

JURNAL PENELITIAN Humaniora

- **Profil Pemanfaatan Hasil-Hasil Penelitian Dosen Universitas Negeri Yogyakarta**
- **Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik bagi Pertumbuhan Ekonomi**
- **Kekuasaan Guru dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah**
- **Dinamika Politik Pengambilan Kebijakan Pembentukan Dua Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul**
- **Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus di Desa Wukirsari Imogiri Bantul**
- **Karakter Gotong Royong Warga dalam Menghadapi Bencana Banjir Lahar Dingin Merapi di Kota Yogyakarta**
- **Analisis Permasalahan Perempuan dan Potensi Lokal di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta**
- **Pengaruh *Quality Management* dalam Peningkatan Kinerja Organisasi SMK**
- **Peranan Rumah Singgah Girlan Nusantara Kabupaten Sleman dalam Pembentukan Karakter Anak Jalanan**

JURNAL PENELITIAN Humaniora

Penerbit:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Negeri Yogyakarta

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab:

Ketua LPPM Universitas Negeri Yogyakarta

Redaksi:

Ketua: Prof. Dr. Suharti
Sekretaris: Yulia Ayriza, Ph.D.
Anggota Redaktur: 1. Dr. Mukminan
2. Dr. Marzuki
3. Prof. Dr. Wawan S. Suherman
4. Prof. Dr. Sukadiyanto
5. Dr. Anwar Efendi
6. Dr. Sujarwo
Redaktur Ahli: Prof. Dr. Irwan Abdullah (UGM)
Redaksi Pelaksana: Ali Muhson, M.Pd.
Mitra Bestari: Prof. Dr. Wuradji, M.S. (UNY)

Tata Usaha/Pelaksana:

Dra. Trina Wahyuni
Tri Sumarni, S.P.

Setting dan Tata Letak:

Hidayati, SE.

Alamat Redaksi/Tata Usaha:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Negeri Yogyakarta
Gedung LPPM Lantai I – Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Pesawat 242, 262 Fax (0274) 518617

<http://www.lppm@uny.ac.id> dan e-mail: lppm.uny@gmail.com, humaniora.uny@gmail.com

Jurnal Penelitian Humaniora yang terbit pertama kali tahun 2001
merupakan lanjutan dari Jurnal Penelitian Iptek dan Humaniora
Frekuensi terbit: tengah tahunan

Semua tulisan yang ada dalam Jurnal Penelitian Humaniora bukan merupakan cerminan sikap dan/atau pendapat Dewan Redaksi. Tanggung jawab terhadap isi dan/atau akibat dari tulisan tetap terletak pada penulis.

JURNAL PENELITIAN

Humaniora

DAFTAR ISI

	Halaman
Profil Pemanfaatan Hasil-Hasil Penelitian Dosen Universitas Negeri Yogyakarta	
<i>Suharjana, Tri Hartiti Retnowati, Suharti dan Sri Atun</i>	101 - 108
Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik bagi Pertumbuhan Ekonomi	
<i>Aula Ahmad Hafidh</i>	109 - 120
Kekuasaan Guru dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah	
<i>Arif Rohman</i>	121 - 130
Dinamika Politik Pengambilan Kebijakan Pembentukan Dua Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul	
<i>Supriyanto</i>	131 - 144
Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus di Desa Wukirsari Imogiri Bantul	
<i>Setiati Widihastuti dan Eny Kusdarini</i>	145 - 155
Karakter Gotong Royong Warga dalam Menghadapi Bencana Banjir Lahar Dingin Merapi di Kota Yogyakarta	
<i>Gunardo RB</i>	156 - 165
Analisis Permasalahan Perempuan dan Potensi Lokal di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta	
<i>Sujarwo dan Lutfi Wibawa</i>	166 - 177
Pengaruh <i>Quality Management</i> dalam Peningkatan Kinerja Organisasi SMK	
<i>Giri Wiyono</i>	178 - 189
Peranan Rumah Singgah Girlan Nusantara Kabupaten Sleman dalam Pembentukan Karakter Anak Jalanan	
<i>Aman dan Lia Yuliana</i>	190 - 200

KEKUASAAN GURU DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH

Arif Rohman

Universitas Negeri Yogyakarta

email: arv_2013@yahoo.co.id

Abstrak: Kekuasaan Guru dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tiga hal, yaitu: (1) konsep pemahaman guru tentang kekuasaan; (2) motif guru dalam memilih menjadi pejabat di jajaran birokrasi pemerintah; (3) cara guru dalam meraih kekuasaan birokrasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif model fenomenologis di wilayah kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini adalah: (1) guru memahami kekuasaan sebagai amanah dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan pendidikan. Apabila amanah datang maka wajib bagi guru untuk menerima dan menjalankannya. (2) motif guru memilih menjadi pejabat di birokrasi pemerintah adalah agar menjadi pelaku langsung dalam pembangunan pendidikan. Menjadi pejabat bagi guru adalah penting dari pada jabatan tersebut dipegang oleh orang yang tidak mengetahui pendidikan. Apabila jabatan dipegang oleh orang yang tidak memahami pendidikan akan berakibat fatal. (3) Cara guru dalam meraih kekuasaan birokrasi adalah melalui PGRI. Penguasa sangat berkepentingan terhadap PGRI dalam rangka menguasai guru, begitu juga guru melalui PGRI dapat lebih dekat dengan penguasa.

Kata kunci: Kekuasaan birokrasi, motif guru, dan kemajuan pendidikan.

Abstract: The Powers of Teachers in The Local Government Bureaucracy. This research was aimed to reveal three things, namely: (1) teachers' understanding of the concept of power, (2) the motives of teachers in choosing to become an official in the government bureaucracy, (3) how the teacher came to power in the bureaucracy. The study was conducted with a qualitative approach with phenomenological models in Bantul district. The results of this study were: (1) teachers' understanding of power as a mandate and an opportunity to be involved in the development of education. When the mandate came, then it is obligatory for teachers to accept and run it. (2) the motives of teachers to choose to become officials in the government bureaucracy is to be direct actors in the development of education. Being officials, it is important for teachers than if the position held by people who do not know the education. if the department is held by people who do not understand education, it will be fatal. (3) How teachers in eliciting power of bureaucracy is by PGRI. Authorities is very interested in the PGRI in order to dominate teachers, as well as teachers by PGRI can be closer to authorities.

Key words: The power of the bureaucracy, the motives of the teachers, and educational advancement.

PENDAHULUAN

Guru merupakan sosok yang memiliki kedudukan sentral dalam proses pembelajaran. Guru menjadi orang yang paling menentukan dalam perancangan dan penyediaan proses pembelajaran di sekolah. Umar Tirtarahardja dan La Sulo (1994) menyebut kedudukan guru di sekolah amat kompleks,

sebagai manager, direktur, organisator, koordinator, komunikator, fasilitator, dan stimulator. Kedudukan guru yang demikian penting, menjadikannya berperan amat strategis dalam kancah penentuan keberhasilan pendidikan dan pembelajaran. Dalam skala lebih luas, guru berperan penting dalam keberhasilan pembangunan di masyarakat.

Secara historis, guru dalam tradisi Jawa kuno dianggap sebagai manusia mulia menjadi tempat bertanya, pembimbing spiritual, dan teladan bagi masyarakat. Tradisi spiritual sufi, menempatkan guru sebagai sosok dengan sifat *kamil mukammila*. Tradisi Hindu India, guru dikenal sebagai '*maha resi guru*' yakni orang yang tugasnya mendidik calon biksu di *Bhinaya Panti*, tempat pendidikan para biksu, yang mengajak muridnya untuk mencapai kelepasan dari kesengsaraan (*samsara*), (Zen Rachmat Sigit dkk, 2006).

Sebagai sosok pribadi yang terpuji, kedudukan dan peran guru tidaklah kecil di mata masyarakat. Frederick Meyer (Dirto Hadisusanto dkk, 1995) mensinyalir guru mempunyai kedudukan penting sebagai sumber keteladanan dan berperan dalam menjaga peradaban sekaligus pelindung kemajuan masyarakat. Oleh karenanya, guru merupakan sosok penting "*as a process leading to the enlightenment of mankind*".

Keterlibatan guru bersama masyarakat merupakan cerminan relasi antar keduanya beserta dinamika yang terjadi seiring dengan intensitas relasi yang dibangun. Keterlibatan guru bersama masyarakat menjadikannya relatif memahami aneka persoalan kemasyarakatan. Akibatnya, guru sering terlibat secara kolaboratif dan supportif dalam interaksi dengan aneka kelompok kepentingan masyarakat (*societal interest group*).

Joel Spring (1993) menyebutkan dalam proses interaksi kemasyarakatan tersebut, guru menjadi bagian penting di dalamnya. Secara politis, ada tujuh kelompok kepentingan yang terlibat dalam interaksi masyarakat terkait pendidikan, yaitu: (1) *politicians of political party*, (2) *education politicians*, (3) *boards of education*, (4) *courts*, (5) *foundations*, (6) *corporate sector*, dan (7) *teachers' unions*. Tujuh kelompok kepentingan tersebut saling berinteraksi dalam relasi kekuasaan terkait penyelenggaraan pendidikan (Joel Spring, 1993). Lebih jauh dalam relasi kekuasaan tersebut terjadi *bargaining of interest*, baik yang bersifat *hard bargaining* atau pun sebaliknya (Joetta

L. Sack (2002).

Hasil penelitian dari Kenneth K. Wong (2006), J. Wagman (2003), J. Rubin and R. Fausset (2005) menyebutkan bahwa banyak kasus pemilihan walikota di Amerika Serikat, isu-isu pendidikan menjadi bagian penting dalam materi kampanye para kandidat. Kenneth K. Wong (2006) menyebutkan, "*Five of the six candidates said they wouldn't hesitate to push for a takeover if the city's schools were to lose their accreditation*". Secara umum, isu pendidikan dalam pemilu di AS meliputi: penguatan kepemimpinan dalam pendidikan publik, reformasi sekolah, dan peningkatan mutu sekolah. Hal ini tidak berbeda dengan yang ada di Indonesia, banyak ahli menyebutkan bahwa setiap kali musim pemilu, isu-isu perbaikan pendidikan selalu menjadi bagian penting dalam kampanye.

Secara teoritis, kekuasaan (*authority*) diartikan amat beragam oleh para ahli. Lasswell dan Kaplan (Cheppy, 1991) mengartikan kekuasaan sebagai '*the participation in the making of decisions*'. Roger H. Soltau (Cheppy, 1991) melihat kekuasaan sebagai '*the capacity to make one's will prevail over that of other's, even against these other wills*'. Meriam Budiharjo (Cheppy, 1991) menyebutkan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain sedemikian rupa sehingga orang lain tersebut mengikuti sesuai dengan keinginan orang yang mempunyai kekuasaan itu.

Ada dua macam jenis kekuasaan (*authority/power*), yaitu *transmitive power* dan *transformative power* (HAR Tilaar, 2003). Kekuasaan jenis pertama adalah suatu kekuasaan yang bertujuan membentuk hubungan subordinasi antar subyek dengan subyek lain, sehingga memunculkan adanya kepatuhan dan kesetiaan. Sedangkan kekuasaan jenis kedua adalah suatu kekuasaan yang bertujuan tidak untuk membentuk hubungan subordinasi, melainkan membangkitkan refleksi pihak lain sehingga menimbulkan aksi kritis. Jenis pertama lebih berorientasi *legitimatif*, sedangkan jenis kedua lebih berorientasi *advokatif*.

itu bila ada guru yang berkeinginan berkarir di bidang struktural birokrasi maka harus keluar dari berprofesi sebagai guru mengingat jabatan struktural tidak boleh dicampuradukkan dengan jabatan fungsional.

DAFTAR PUSTAKA

Cheppy Haricahyono. (1991). *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Cresswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches (second edition)*. London: Sage publications.

Dirto Hadisusanto dkk. (1995). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta

HAR Tilaar. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Indonesiatara.

Laksana, S.D. (24 Nopember 2011). Kasihanilah kepala daerah. *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, p.4. Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia Rubin, J. and

Fausset, R. (2005). *Mayor Talks Tough to Push School Takeover*. Los Angeles Times, November 21, 2005. p. A1.

Sack, Joetta L. (2002). "Hard bargaining". *Education Week* Volume 21 Apr 24, 2002;

Spring, Joel. (1993). *Conflict of Interests: The Politics of American Education*. New York: Longman.

Umar Tirtaraharja dan La Sulo. (1996). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Ditjend Pendidikan Tinggi.

Wagman, J. (2003). *Power Brokers Play Role in Campaign for School Reform*. St. Louis Post-Dispatch, July 20. p. C4.

Wong, Kenneth K. (2006). *The Political Dynamics of Mayoral Engagement in Public Education*. Harvard Educational Review. Cambridge: Summer 2006. Vol. 76, Iss. 2.

Zen Rachmat Sugito dkk. (2006). *Sang Guru: Peta Ringkas Hubungan Guru-Murid di Pelbagai Tradisi*. Yogyakarta: Ekspresi Buku LPM UNY